

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberikan gambaran tentang posisi keuangan suatu daerah. Tiga komponen utama dari APBD adalah pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah. Aspek belanja daerah merupakan manifestasi dari kemampuan pemerintah saat memenuhi kebutuhan penduduknya. Belanja daerah yang adalah estimasi beban belanja suatu daerah yang akan didistribusikan secara merata dan adil sehingga bisa diukur serta dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa dibedakan, terutama dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik (Utami & Iskandar, 2020). Peningkatan belanja daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemerintah suatu daerah pada era otonomi daerahnya diberdayakan secara mandiri untuk mengelola PAD guna mendukung belanja daerah. Namun, pusat juga memiliki kewajiban dalam membantu masing – masing daerah dalam hal memperkecil *fiscal gap* melalui mekanisme fiskal transfers (penyaluran dana perimbangan) berupa DAU, DAK, dan DBH.

Kebijakan penyaluran anggaran perimbangan dilihat secara positif, tetapi jika dilihat kembali ternyata kebijakan tersebut dapat membuat disinsentif atau demotivator pada berbagai pemerintah daerah, yang dapat mengakibatkan kemalasan fiskal dan ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat mengoptimalkan kapasitas daerahnya karena terus berharap atau bergantung pada relokasi atau pendanaan pemerintah pusat untuk memenuhi biaya belanja daerahnya (Chadiza & Syahnur, 2022). Teori *flypaper effect* dapat digunakan untuk mengidentifikasi indikasi inefisiensi pada dana transfer (Septriani, Armelly, Ekaputri, & Pasaribu, 2020).

Courant, Gramlich, dan Rubinfeld memperkenalkan istilah *flypaper effect* pertama kali pada tahun 1979, dimana istilah tersebut dipakai guna menyampaikan pendapat Arthur Okun (1930) tentang “*money sticks where it hits*” yang memaparkan bahwa bagaikan lalat yang terletak dalam kertas lalat, uang juga terletak dalam tempatnya (Courant, Gramlich, & Rubinfeld, 1979). Menurut Oates, *flypaper effect* adalah kondisi dimana posisi transfer lebih kecil dibandingkan belanja daerah daripada pendapatannya sendiri (Oates, 1999). *Flypaper effect* terjadi saat pemerintah daerah menerima *grant*, lalu digunakan untuk meningkatkan belanjanya tanpa meningkatkan pendapatan asli. Secara implisit terdapat beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan dari munculnya *flypaper effect* atas belanja daerah kabupaten/kota, termasuk adanya celah kepincangan fiskal (*fiscal gap*) yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam memanfaatkan sumber – sumber yang berkontribusi pada pertumbuhan PAD, kemudian menyebabkan ketergantungan pada pemerintah pusat, terjadinya respons yang berlebihan dalam pemanfaatan dana transfer, serta kurangnya kemampuan kemandirian keuangan pada daerah terkait. Penting untuk mengidentifikasi adanya *flypaper effect* guna mencegah dana transfer menjadi sumber utama pembiayaan belanja daerah, karena jika tidak dilakukan, potensi daerah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 1. Kontribusi PAD, DBH, DAU, dan DAK pada 4 Provinsi dengan Belanja Daerah (ribu rupiah) Terbesar Se-Indonesia Tahun 2016 – 2020

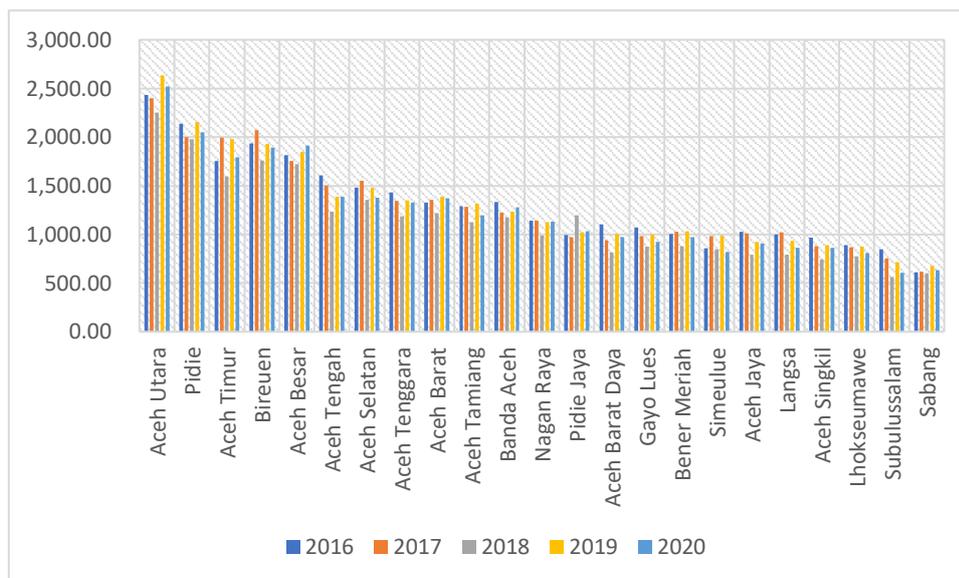
	Jawa Barat	Jawa Timur	Jawa Tengah	Aceh	
2016	BD	27,621,964,467	23,859,953,926	19,354,374,825	19,808,221,473
	%PAD	62%	66%	60%	10%
	%DBH	6%	8%	5%	1%
	%DAU	5%	7%	10%	6%
	%DAK	28%	23%	27%	1%
2017	BD	32,706,749,485	28,878,134,636	22,884,713,019	13,832,848,610
	%PAD	55%	60%	55%	16%
	%DBH	6%	6%	4%	2%
	%DAU	9%	13%	16%	15%
	%DAK	28%	24%	29%	11%
2018	BD	33,333,824,962	30,662,093,022	24,478,632,557	12,306,306,187
	%PAD	59%	60%	56%	19%
	%DBH	5%	9%	3%	2%

	%DAU	9%	12%	15%	17%
	%DAK	28%	22%	27%	12%
	BD	35,833,086,126	13,967,109,633	26,151,062,842	14,672,122,195
2019	%PAD	59%	138%	55%	18%
	%DBH	4%	17%	2%	1%
	%DAU	9%	29%	14%	16%
	%DAK	28%	54%	27%	12%
	BD	38,127,531,749	32,286,757,637	25,651,740,350	13,242,212,802
2020	%PAD	49%	56%	53%	19%
	%DBH	5%	7%	3%	4%
	%DAU	8%	11%	13%	15%
	%DAK	28%	24%	29%	13%

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah 2022, data diakses sebagian dari Lab IE UPNVJ

Daerah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Provinsi Aceh. Menurut BPS, Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan presentase kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera sejak tahun 2002. Dalam menangani kemiskinan yang ada, pemerintah daerah Aceh meningkatkan spending belanja guna menggerakkan ekonomi aceh secara keseluruhan. Hal ini terbukti besarnya belanja daerah aceh dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2020 Aceh menempati posisi kelima sebagai provinsi dengan belanja daerah terbesar se-Indonesia. Namun diantara kelima provinsi tersebut diduga kuat terjadi fenomena *flypaper effect* di Provinsi Aceh. Fenomena tersebut didasari oleh dominannya penggunaan dana transfer yang diwakilkan oleh DAU, DAK, dan DBH dalam membiyai pembangunan Provinsi Aceh, dimana terlihat pada Tabel 1. bahwa dari tahun 2017 – 2020 keterlibatan PAD dalam belanja daerah jauh lebih kecil dibanding dengan total dari DAU, DAK, DBH atau dana perimbangannya. Fakta ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan Provinsi Aceh masih sangat bergantung kepada dana transfer, yang memungkinkan membuat perilaku asimetris di pemerintah daerah yang

menimbulkan indikasi inefisiensi pada dana transfer sehingga menyebabkan *flypaper effect* pada belanja daerah tersebut.



Sumber : BPS Aceh, data diolah 2022, data diakses sebagian dari Lab IE UPNVJ

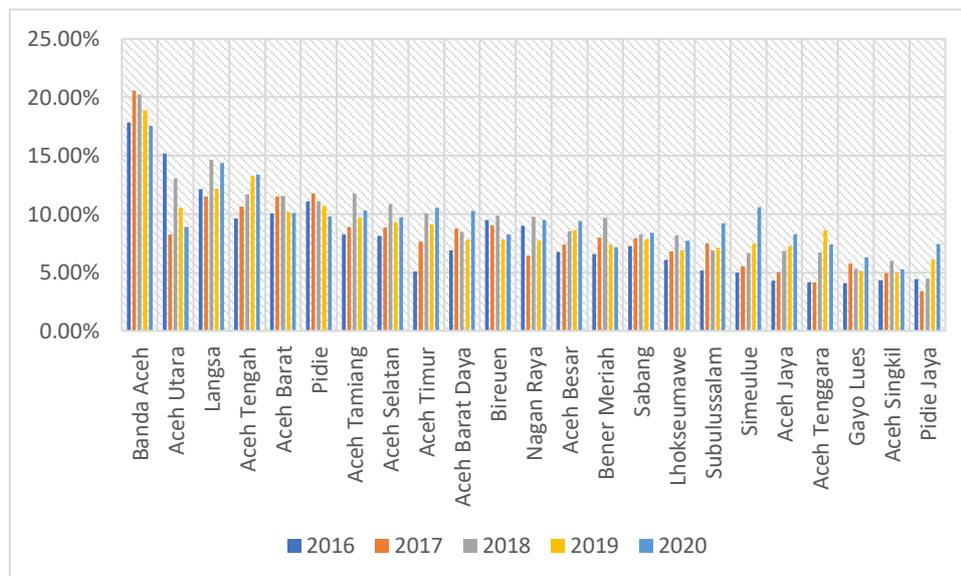
Gambar 1. Belanja Daerah 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016 – 2021 (Miliar Rupiah)

Dalam rangka melaksanakan kebutuhan publik, pemerintah membelanjakan uang untuk membuat pembiayaan, dimana kemudian disebut sebagai belanja daerah, yaitu. dana yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu daerah dalam rangka memenuhi kewenangan serta amanah dari masyarakat dan pemerintah di atasnya. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 belanja daerah terdiri atas belanjalangsung dan belanja tidaklangsung. Pada grafik di atas terlihat bahwa belanja pemerintah Provinsi Aceh tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 hampir seluruh belanja daerah kabupaten/kota menurun, lalu karna adanya covid-19 pada 2019 membuat belanja daerah semua kabupaten/kota meningkat hingga akhirnya menurun kembali di tahun 2020. Belanja daerah tertinggi dari tahun 2016 – 2020 terjadi di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2019 sebesar Rp.2.636,89 miliar, sedangkan belanja daerah terendah dari tahun 2016 – 2020 terjadi di Kota Subulussalam pada tahun 2018 sebesar Rp.562,25 miliar. Pemerintah daerah berperan peting dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Optimalisasi tersebut dapat terlaksana jika pengelolaan keuangan

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Terlihat bahwa pengeluaran pemerintah Provinsi Aceh dari tiap daerahnya berbeda – beda, dimana setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan kepemilikan pendapatan berupa penerimaan daerahnya. Namun, perbedaan kemampuan keuangan tiap daerah akan menciptakan kesenjangan keuangan sehingga dapat membuat perbedaan dalam pembangunan antar daerah (Agussalim, Mar'atus , & Sultan, 2022). Dari gambar di atas terlihat rendahnya serapan anggaran belanja daerah pada kota yang ada pada Provinsi Aceh, dimana serapan belanja daerah Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Kota Subulussalam lebih kecil dari serapan belanja daerah pada kabupaten Provinsi Aceh. Rendahnya serapan belanja daerah akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan pada perkotaan di Provinsi Aceh, padahal perkotaan merupakan pusat administrasi yang seharusnya menjadi representatif pada pembangunan suatu daerah. Dimana, menurut Tjiptoherijanto dalam (Herdiana, 2022) mengatakan bahwa berdasarkan fakta di Indonesia dengan adanya pembangunan perkotaan sebagai pusat pemerintah baik tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota akan diikuti oleh pembangunan ekonomi dan pusat perniagaan dalam wilayah tersebut. Pada penelitian ini diduga belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh terpengaruh oleh beberapa hal, seperti PAD, DAU, DAK, dan DBH

Pemerintahan masing-masing daerah selalu ingin meningkatkan PAD dan membagi dana yang ada untuk aktivitas. PAD berperan untuk membiayai kebutuhan suatu daerah seperti pembangunan fasilitas publik. Pemerintah daerah akan memiliki peluang lebih besar untuk membangun ekonominya jika PAD tinggi karena akan meningkatkan baik pembiayaan yang tersedia untuk pembangunan fasilitas umum maupun derajat kemandirian daerah. Permasalahan muncul ketika suatu daerah memiliki PAD yang rendah sehingga membuat ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan fasilitas publik karena terbatasnya anggaran yang ada (Laila, Triwahyuningtyas, & Aminda, 2022). Permasalahan ini terjadi kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, dimana kontribusi PAD masih

tergolong sangat rendah. Hal ini terlihat dalam data laporan kontribusi PAD Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Aceh tahun 2016 – 2020 berikut ini.



Sumber : BPS Aceh, data diolah 2022, data diakses sebagian dari Lab IE UPNVJ

Gambar 2. Kontribusi Realisasi PAD Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2016 – 2020 (Persen)

Berdasarkan dari gambar di atas bahwa hingga kurun waktu 2020 keterlibatan anggaran ril Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh sangatlah rendah, padahal tingkat kemandirian suatu pemerintah dalam pembangunan daerah akan ditentukan oleh besarnya kontribusi PAD yang memadai sehingga pemerintah tidak terus bergantung pada bantuan Pemerintah Pusat. Pengukuran taraf kemandirian keuangan suatu daerah ditunjukkan dengan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerahnya (Laila, Triwahyuningtyas, & Aminda, 2022). Berdasarkan persentase PAD atas total pendapatan daerah, tingkat kemandirian keuangan tiap daerah dapat digolongkan menjadi terlampaui rendah (0-25%), rendah (>25-50%), sedang (>50-75%) dan tinggi (di atas 75%) (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018). Grafik 1.2 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh tergolong rendah sekali dengan presentasi dibawah 25 persen tiap tahunnya. Kontribusi PAD tertinggi dari tahun 2016 – 2020 diperoleh Kota Banda Aceh tahun 2017 yakni sebesar 20,58 persen atau senilai 270,17

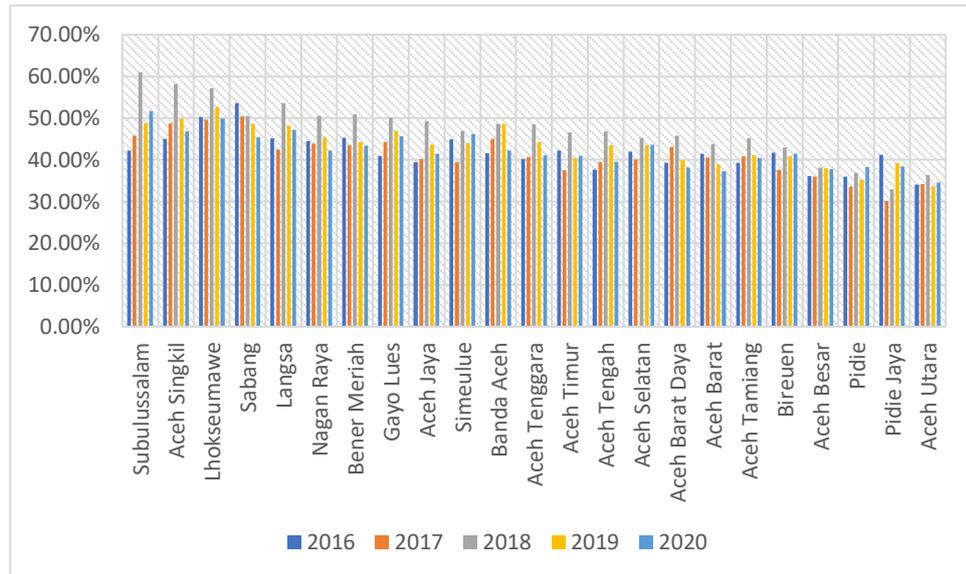
Anissa Mutiara Dewi, 2023

FENOMENA FLYPAPER EFFECT ATAS BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH TAHUN 2016 – 2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan
www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

miliar rupiah, sedangkan kontribusi PAD terendah tahun 2016 – 2020 diperoleh Kabupaten Pidie Jaya tahun 2017 yakni sebesar 3,39 persen atau senilai 47,41 miliar rupiah. Kuantitas belanja daerah secara teoritis dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah PAD. Sesuai teori pengeluaran pemerintah oleh Peacock dan Wiseman yang mendasarkan teorinya, dimana masyarakat memiliki toleransi pajak pada tingkat tertentu, yakni kapasitas untuk memahami tingkat perpajakan yang diperlukan pemerintah untuk mendukung pengeluarannya. Karenanya masyarakat lebih bersedia untuk membayar pajak setelah mereka memahami jika pemerintah memerlukan anggaran untuk pembiayaan kegiatan pemerintah. Peningkatan penerimaan juga akan berdampak pada peningkatan pemasukan ril daerah yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan belanja daerah. Oleh karena itu, meningkatnya nilai pajak daerah akan beriringan dengan meningkatnya PAD, sama halnya dengan meningkatnya pula belanja daerah. Di samping itu, nyatanya teori tersebut tidak sesuai dengan data yang ada pada gambar di atas, dimana PAD kabupaten/kota tergolong rendah namun belanja daerah Provinsi Aceh tergolong tinggi. Hal ini menjelaskan mengapa pemerintah daerah terus bergantung pada pemerintah daerah untuk pendanaan karena kontribusi dari PAD terlalu kecil untuk memberikan dampak yang berarti terhadap pendapatan daerah.

Pemerintah provinsi atau kabupaten/kota tidak mungkin sepenuhnya mengandalkan PAD karena keperluan belanja daerah dimana terus meningkat. karenanya, pemerintah daerah juga mempunyai pendanaan atas pemerintah pusat berupa transfer dari pemerintah pusat yakni dana perimbangan. Dana perimbangan tersebut terdiri dari DAU, DAK, dan DBH. Anggaran perimbangan ini tidak bersifat kekal karena hanya bersifat bantuan sementara sebelum daerah dapat mandiri dalam hal keuangannya, sehingga daerah sebaiknya tidak menggantungkan sumber keuangan utamanya dari dana perimbangan ini (BPS Aceh, 2022).

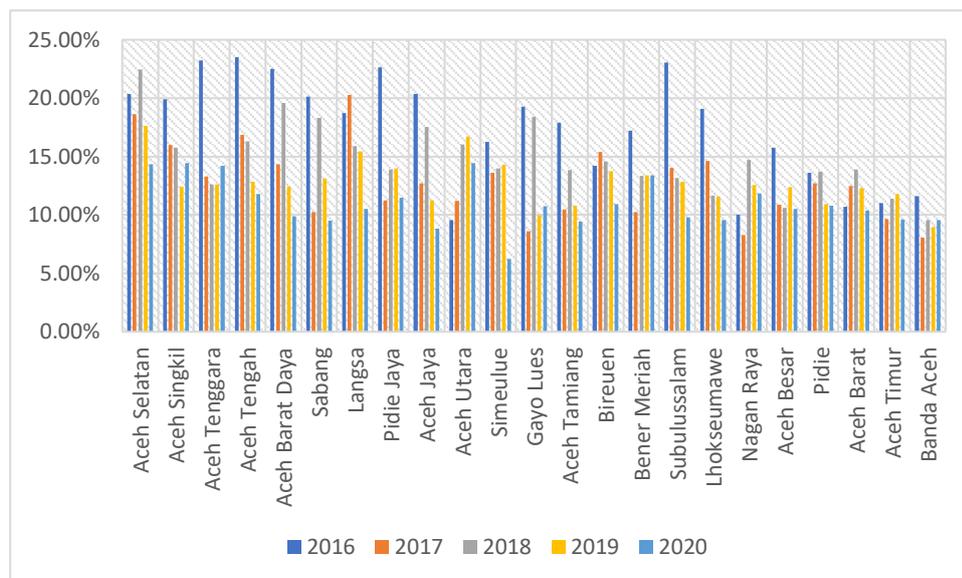


Sumber : BPS Aceh, data diolah 2022, data diakses sebagian dari Lab IE UPNVJ

Gambar 3. Kontribusi Realisasi DAU Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2016 – 2020 (persen)

Dana Alokasi Umum (DAU) berguna dalam meningkatkan alokasi belanja daerah. DAU menjadi pendanaan, dimana didasarkan pada pendapatan APBN dan menjadi dana paling penting untuk mencukupi kebutuhan daerah, dimana berarti DAU memiliki pengaruh kepada Belanja Daerah. Pada grafik di atas diketahui bahwa secara keseluruhan kontribusi DAU pada pendapatan daerah cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, dimana besarnya kontribusi DAU dari 2016 – 2020 adalah sekitar 30.04 – 61.03 persen. Besarnya kontribusi ini mengindikasikan tidak mandirinya pemerintah daerah berkaitan dengan alokasi dana dari pemerintah pusat. Persentase DAU tertinggi dari tahun 2016 – 2020 diterima oleh Kota Subulussalam pada tahun 2018 yakni sebesar 61.03 persen atau senilai Rp.345.25 miliar rupiah sedangkan persentase DAU terendah diterima oleh Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2017 yakni sebesar 30.04 persen atau senilai Rp.420.52 miliar rupiah. Tingginya kontribusi DAU Kabupaten/Kota di

Provinsi Aceh memperlihatkan betapa bergantungnya pemerintah daerah terhadap transfer DAU dari pemerintah pusat.

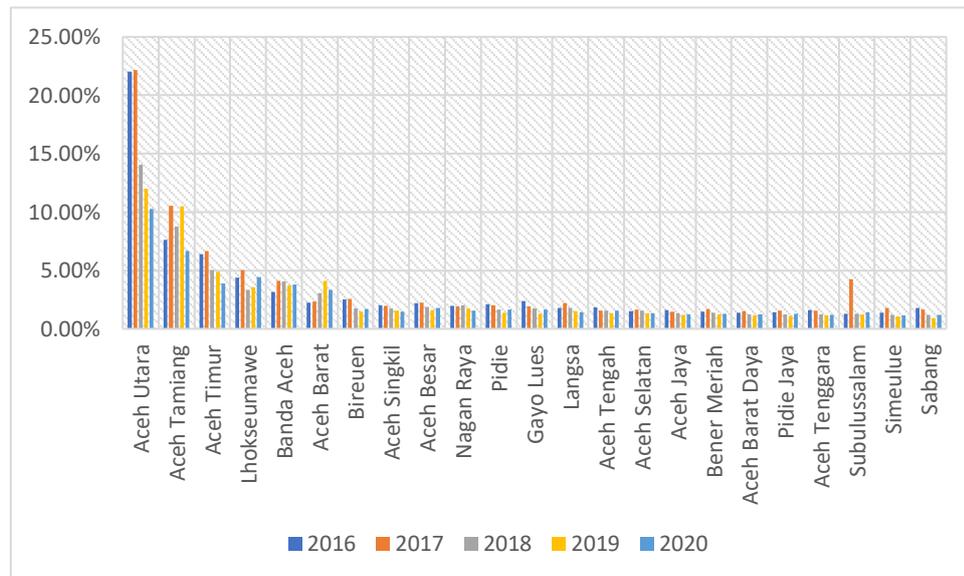


Sumber : BPS Aceh, data diolah 2022, data diakses sebagian dari Lab IE UPNVJ

Gambar 4. Kontribusi Realisasi DAK Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2016 – 2020 (Persen)

Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk pemberian anggaran aktivitas tertentu yang menjadi tanggung jawab daerah sebagaimana urusan setempat. Terutama dalam hal pembiayaan keperluan fasilitas untuk melayani masyarakat yang kurang meraih batas tertentu atau sebagai pendorong melajunya kemajuan daerah. Pada grafik di atas diketahui bahwa secara keseluruhan kontribusi DAK pada pendapatan daerah cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya, namun kontribusi DAK tetap lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi PAD. Adapun besarnya kontribusi DAK dari 2016 – 2020 adalah sekitar 6.21 – 23.48 persen. Besarnya kontribusi ini menunjukkan betapa bergantungnya pemerintah daerah pada anggaran yang dsalurkan oleh pemerintah pusat. Persentase DAK tertinggi dari tahun 2016 – 2020 diterima oleh Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2016 yakni sebesar 23.48 persen atau senilai Rp.382.8 miliar rupiah sedangkan persentase DAK terendah diterima oleh Kabupaten Simuelue pada tahun 2020 yakni sebesar 6.21 persen atau senilai Rp.56.83 miliar rupiah. Tingginya kontribusi DAK Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menandakan bahwa pemerintah daerah

belum mandiri terhadap transfer anggaran alokasi umum dari pemerintah pusat. Bilamana suatu saat anggaran DAK ini dihentikan maka akan merusak jalannya roda pemerintahan dan proses pembangunan didaerah tersebut.



Sumber : BPS Aceh, data diolah 2022, data diakses sebagian dari Lab IE UPNVJ

Gambar 5. Kontribusi Realisasi DBH Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh Tahun 2016 – 2020 (Persen)

Dana Bagi Hasil (DBH) diartikan sebagai anggaran yang bermula atas pemasukan APBN yang disalurkan untuk daerah atas dasar penilaian dalam pendanaan keperluan daerah. Dana Bagi Hasil yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah memiliki dua tipe, yakni DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Anggaran tersebut ditujukan guna upaya meminimalisir ketidakseimbangan fiskal vertikal diantara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kontribusi DBH tahun 2016 – 2020 terbilang kecil yakni sekitar 0.94 – 22.18. Pada Grafik 1.5 dapat dilihat bahwa kontribusi DBH cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal tersebut belum searah terkait penelitian yang diselesaikan Yuliana dkk (2017) berpengaruh signifikan positif kepada belanja daerah.

Penelitian yang lebih awal melakukan peninjauan mengenai *flypaper effect* terhadap belanja daerah adalah Yuliana dkk (2017), Ansori & Muthmainah (2018), Utami & Iskandar (2020), dan Pratami & Dwirandra (2017). Hasil penelitian Yuliana dkk (2017) menunjukkan bahwa DBH, DAU

serta PAD memiliki pengaruh signifikan positif kepada belanja daerah. Di samping itu, DAK memiliki pengaruh signifikan kepada belanja daerah, dan mengalami *flypaper effect* terhadap Belanja Daerah terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2012-2016. Hasil penelitian Ansori dan Muthmainah (2018) menunjukkan apabila DAU, DAK, DBH, serta PAD memiliki pengaruh positif kepada belanja daerah, lalu situasi *Flypaper Effect* kerap dirasakan oleh Kabupaten/ Kota di Pulau Bali dan Nusra. Hasil penelitian Utami dan Iskandar (2020) menunjukkan bahwa PAD, PDRB Per Kapita, total Penduduk, serta Dana Perimbangan berpengaruh signifikan positif kepada belanja daerah, lalu tidak ada *Flypaper Effect* dalam belanja daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Hasil penelitian Pratami dan Dwirandra (2017) menunjukkan bahwa PAD (*herfindahl concentration taxes*), DAK, dan DBH berpengaruh negatif kepada belanja daerah, lalu DAU memiliki pengaruh signifikan positif kepada belanja daerah, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan PDRB memiliki pengaruh positif kepada belanja daerah. Hasil penelitian Mahendra (2018) memperlihatkan apabila DAU, DBH, dan PAD memiliki pengaruh positif kepada belanja daerah.

Penelitian tentang fenomena *flypaper effect* masih relatif terbatas. Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen yang cukup bervariasi dalam menguji pengaruh variabel tersebut terhadap belanja daerah. Penelitian – penelitian tersebut juga menunjukkan hasil penelitian yang beragam. Berdasarkan Ketiga hal tersebut dan uraian dimana sebelumnya telah dijelaskan, peneliti memiliki motivasi dalam rangka melaksanakan pengujian kembali pada indikator yang memiliki pengaruh terhadap belanja daerah berupa anggaran perimbangan yang diprosikan dengan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta pendapatan asli daerah pada belanja daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh periode 2016 – 2020. Judul yang diangkat pada penelitian ini ialah **“Fenomena *Flypaper Effect* Atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016 – 2020”**.

1.2 Perumusan Masalah

Mayoritas alokasi dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) sejatinya berdasarkan faktor belanja namun belum dapat memerdulikan kesanggupan terkait peningkatan PAD. Karena itu, pemerintah daerah jarang melihat sumber pendapatan daerah dan terus meminta transfer yang berjumlah lebih dari pemerintah pusat setiap tahunnya. Jika kondisi ini terus berlanjut, ketergantungan pada penyaluran anggaran perimbangan dari pemerintah pusat untuk membayar belanja daerah akan meningkat. Permasalahan tersebut ditemukan dalam penelitian ini, dimana pada lima tahun ke belakang belanja daerah Provinsi Aceh cenderung meningkat. Namun, rendahnya kontribusi PAD dan tingginya kontribusi dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) pada Provinsi Aceh menunjukkan jika provinsi aceh sangat belum mandiri berkaitan dengan penggunaan anggaran dari pemerintah pusat sebagai pembiayaan belanja daerah dan pembangunan tanpa memaksimalkan kemampuan yang terdapat dalam daerah. Pemberian dana perimbangan yang besar membuat Pemda terus berusaha agar periode berikutnya bisa memperoleh dana transfer tetap. Hal tersebut membuat belanja daerah tidak signifikan terpengaruh oleh PAD yang kemudian berimplikasi pada *flypaper effect*. Pemberian dana perimbangan yang pada dasarnya harus dijadikan acuan dalam meminimalisir ketergantungan daerah, malah dijawab tidak sesuai dari daerah sehingga membuat daerah semakin bergantung pada pemerintah pusat. Maka berdasarkan permasalahan tersebut, perumusan masalahnya, yaitu:

- 1) Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
- 2) Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
- 3) Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
- 4) Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
- 5) Apakah terjadi *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- 5) Untuk menganalisis apakah terjadi *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan terkait kondisi *flypaper effect* atas belanja daerah, dan diharapkan dapat berguna bagi sarana implikatif ilmu pengetahuan dari hal teoritis yang selama ini telah dipahami selama perkuliahan

1.4.2 Manfaat Praktis

A. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dorongan untuk pemerintah agar menguatkan partisipasi dan kreativitas masyarakat serta meningkatkan peran keuangannya sebagai perwujudan ketidaktergantungan daerah, memaksimalkan kemampuan lokal, serta memajukan mutu publik demi peningkatan daerah.

B. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam referensi, memperluas informasi dan wawasan guna mengembangkan penelitian pada akuntansi sektor publik, dan keuangan.

C. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi penambah pengetahuan dan wawasan untuk penulis lain dan pembaca. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

bahan rujukan terutama dalam mengkaji topik-topik yang memiliki hubungan dengan persoalan yang diangkat pada penelitian ini.